

HADIAN

**KEDUDUKAN DAN PERANAN GERAKAN NON BLOK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**



UNIVERSITAS

Diejukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Internasional
Pada Fakultas Hukum
Universitas "45"

UJUNG PANDANG

OLEH

RONNY PESIK

Stb/Nirm : 4588060027/8811304893

1995

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RONNY PESIK
No. Stb/Nirm : 4588060027/8811304893
Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Nopember 1995

telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Hukum Internasional yang terdiri dari :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum UNHAS

DR. Andi Jaya Sose, SE. MBA.

Achmad Ali, S.H. M.H.

Panitia Ujian

K e t u a

Sekretaris

Rachmad Baro, S.H.

Fadli Andi Natsif, S.H.

Team Penguji

1. Prof. Frans E. Likadja, S.H.

2. Albert Lokollo, S.H.

3. U.R. Pattileuw, S.H.

4. Taquuddin Kadir, S.H.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RONNY PESIK
Nomor Dth/NIRM : 4588060027/8811304893
Fakultas : H u k u m
Jurusan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN PERANAN GERAKAN NON BLOK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.

Nomor pendaftaran :

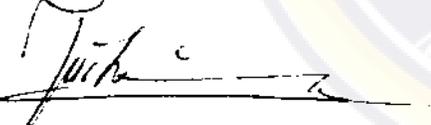
Tanggal pendaftaran :

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing,
untuk diajukan dalam ujian Skripsi, mahasiswa program strata
satu (S1).

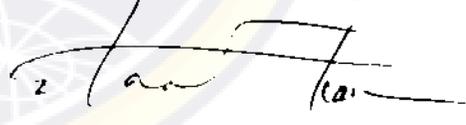
Ujung Pandang,
Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

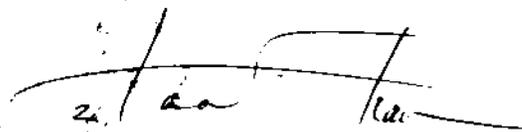


TAGYUDDIN KADIS, S.H



FADLI ANDI NATSIF, S.H

Diketahui :
Ketua Bagian HI



FADLI ANDI NATSIF, S.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : RONNY PESIK
Nomor Stb/NIRM : 4588060027/8811304893
Fakultas : H u k u m
Jurusan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : KEDUDUKAN DAN PERANAN GERAKAN NON
BLOK DALAM PERSFEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL.

Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran :
Nomor Pendaftaran :

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Ujung Pandang,

Dekan

RACHMAD BARO, S.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Pengasih atas segala berkat dan karuniaNya yang senantiasa menyertai penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Sehubungan dengan penulisan Skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose,SE. MBA. selaku Rektor Universitas " 45 " .
2. Bapak Rachmad Baro, S.H. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas " 45 " .
3. Bapak Taquuddin Kadir, S.H. selaku pembimbing satu serta Bapak Fadli Andi Natsif, S.H. pembimbing dua penulis yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Universitas "45".
5. Bapak, direktur CSIS di Jakarta yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

6. Bapak Pimpinan LKBN Antara di Jakarta, yang juga telah memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan LIPI di Jakarta, yang juga dalam segala upayanya membantu penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu dan mendorong penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat ketidaksempurnaan baik dari susunan maupun isinya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan koreksi yang sifatnya membangun.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sesama mahasiswa, serta semua pihak dalam menambah dan melengkapi pengetahuan.

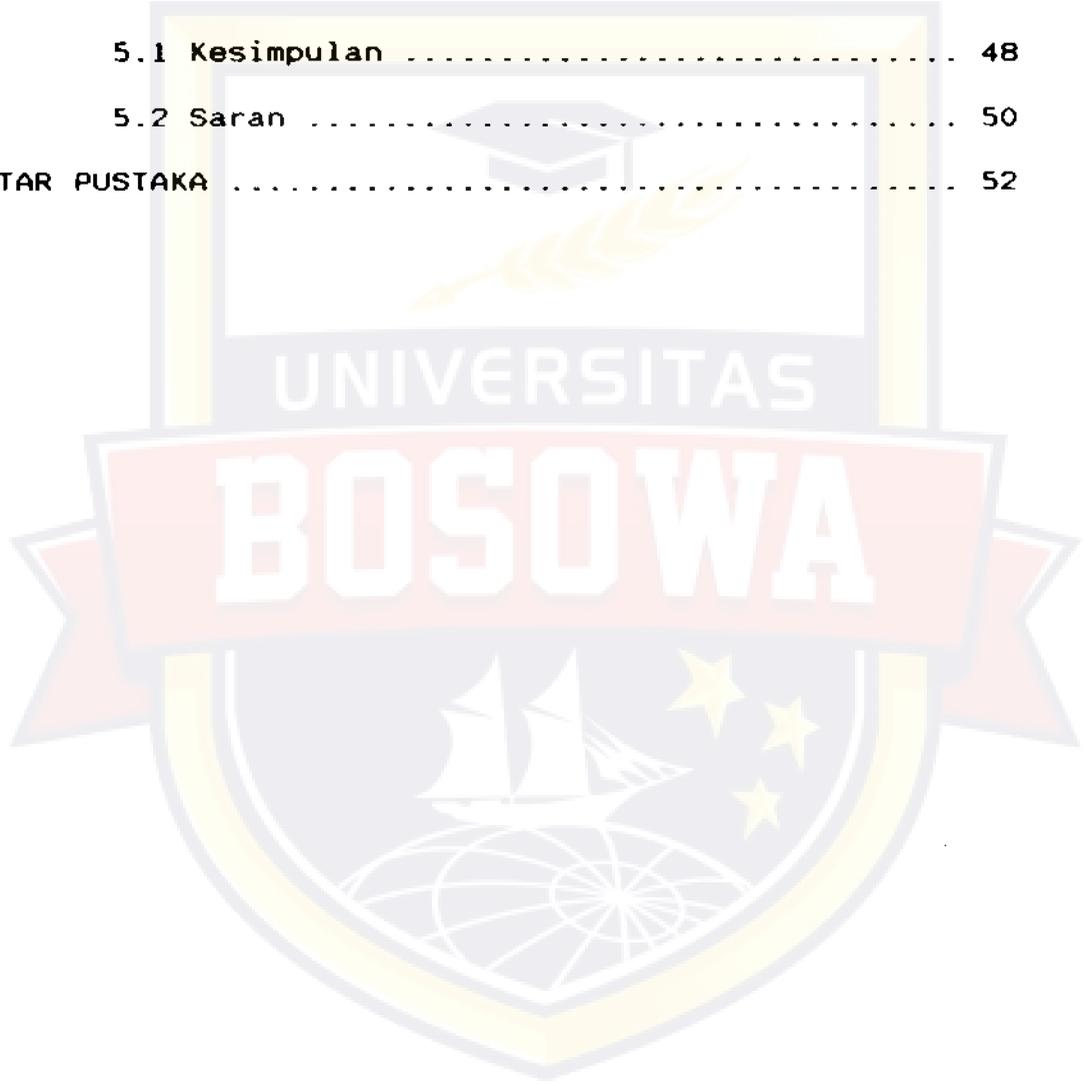
Ujung Pandang, 8 Nopember 1995

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	3
1.3 Metode Penelitian	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
BAB 2. TINJAUAN UMUM TENTANG GERAKAN NON BLOK	6
2.1 Latar Belakang Lahirnya Gerakan Non Blok ..	6
2.2 Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Non Blok ..	14
2.3 Tujuan Pokok Gerakan Non Blok	18
BAB 3. KEDUDUKAN GERAKAN NON BLOK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	20
3.1 Organisasi Internasional sebagai Subyek Hukum Internasional	20
3.2 Analisis Gerakan Non Blok sebagai Satuan (entity) Internasional	24
BAB 4. PERANAN GERAKAN NON BLOK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK INTERNASIONAL	31
4.1 Perkembangan Tata Hubungan Masyarakat Internasional.....	31
4.2 Relevansi Gerakan Non Blok sebagai Wadah	

Perjuangan Negara Berkembang	41
4.3 Mekanisme Gerakan Non Blok sebagai Forum Penyelesaian Konflik Internasional.....	45
BAB 5. PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional berharap dunia bisa kembali tenang, aman dan penuh saling pengertian. Umat Manusia sangat mendambakan karena mereka telah merasakan betapa menderitanya akibat perang yang mencekam seluruh dunia itu, baik langsung maupun tidak langsung. Umat manusia sangat mendambakan perdamaian dan persaudaraan agar mereka dengan leluasa melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan hidup. Namun harapan itu ternyata hanya tinggal harapan. Ketegangan baru muncul dalam bentuk lain yang oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada tahun 1947 disebut cold war atau perang dingin. (LKBN : 1985, hal 43).

Blok Barat dan Blok Timur setelah berhasil kalahkan musuh mereka bersama, negara-negara poros Roma-Berlin dan Tokyo, saling berhadapan berebut pengaruh di dunia ini. Kedua pihak saling curiga-mencurigai. Saling menganggap yang lainnya sebagai ancaman bagi kelangsungan hidupnya. Karenanya masing-masing memperkuat diri dengan penguasaan senjata mutakhir terutama senjata nuklir. Pakta NATO di Barat dan Pakta Warsawa di Timur berpacu sambil mengincar kelemahan lawan untuk sewaktu-waktu menjadi sasaran pukulan yang mematikan.

Bangsa-bangsa yang baru merdeka melihat pertarungan dua kekuatan besar itu dengan penuh kecemasan. Bayangan Perang Dunia II masih jelas. Perang Dingin bukan mustahil sewaktu-waktu akan berubah jadi perang dunia yang baru. Dan apabila terjadi, maka malapetakanya akan jauh lebih dahsyat dari yang sudah-sudah. Senjata nuklir yang sama-sama dimiliki oleh kedua blok itu pasti akan ikut bicara dengan akibat yang tak dapat diperkirakan.

Adanya dua blok kekuatan itu benar-benar dirasakan sebagai ancaman bagi tata hubungan internasional. Kedua pihak berusaha sekuat tenaga dan dengan berbagai cara berusaha untuk menjadi pemenang dan penguasa dunia. Kepentingan bangsa-bangsa kekuatan kecil tak dihiraukan serta kedaulatan dan kebutuhan wilayah bangsa-bangsa itu setiap saat berada dalam bahaya.

Menyadari akan keadaan politik dunia yang tidak sehat itu bangsa-bangsa yang baru merdeka umumnya memilih tidak melibatkan diri pertarungan kedua blok itu. Mereka bersikap netral, tidak memihak salah satu pihak. Namun dari beberapa negara itu muncul kesadaran bahwa bersikap netral saja tidak cukup. Mereka tidak boleh bersikap pasif serta masa bodoh terhadap situasi internasional. Mereka harus ikut berusaha memperbaiki tata hubungan internasional yang rapuh itu. Mereka harus aktif memecahkan masalah internasional, tidak menyerahkannya begitu saja pada kehendak kekuatan-kekuatan besar dunia itu.

Sikap politik seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Non Aligned atau Non Blok.

Presiden Soekarno dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama Non Blok di Beograd tahun 1961 dengan gamblang menggambarkan yang dimaksud dengan politik non blok (LKBN : 1985,44) seperti berikut :

"Jangan ada salah faham. Non Blok bukanlah neutrality. Ini bukan sikap pura-pura atau alim atau munafik dari seseorang yang menjauhkan diri dari suatu penyakit menular. Politik non blok bukanlah politik mencari posisi netral jika ada peperangan; politik non blok bukanlah politik netral tanpa warna sendiri. Menjadi non blok tidak berarti menjadi penyangga antara dua blok raksasa. Non Blok adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan, yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial dan kebebasan untuk merdeka".

Istilah Non Aligned atau Non Blok muncul pertama kali secara tertulis dalam pernyataan bersama Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito dan Perdana Menteri India Nehru di New Delhi tahun 1954. Walaupun istilah itu baru muncul pada tahun itu namun sesungguhnya jauh sebelumnya telah banyak negara yang berpolitik demikian. Indonesia dan India misalnya sudah menganut garis politik demikian sejak kemerdekaan masing-masing.

1.2 Batasan Masalah

Timbulnya Gerakan Non Blok mencerminkan keinginan yang spontan dalam upaya menghindari dari pertentangan-pertentangan blok sambil berupaya mencari jalan penyelesaian serta ikut memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mengingat banyaknya masalah yang sedang di

hadapi untuk dipecahkan seperti menentang kolonialisme dan imperialis dalam segala macam dan bentuk, maka penulis membatasi masalah-masalah sehubungan dengan Gerakan Non Blok (GNB) dalam percaturan Dunia seperti :

1. Apakah Gerakan Non Blok dapat disebut sebagai Organisasi Internasional yang memiliki kepribadian Internasional?
2. Sejauh manakah Gerakan Non Blok berperan sehingga dapat mempengaruhi negara-negara lain atau masyarakat Internasional?

1.3 Metode Penelitian

Untuk mengawali permasalahan yang menyangkut pembahasan skripsi ini, maka penulis melakukan suatu penelitian kepustakaan atau library research, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada kajian literatur berupa buku-buku ilmiah, makalah serta majalah-majalah yang ada kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Dan sebagai kelengkapan dari data penulis, sekaligus bahan masukan untuk menganalisis dan mengungkapkan permasalahan, maka penulis melakukan penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada mereka yang dianggap ahli dalam permasalahan tersebut.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini sebagai masukan untuk mengetahui peran Gerakan Non Blok dalam meredakan ketegangan-ketegangan baik yang dilakukan oleh negara

Super Power sendiri maupun ketegangan yang dilakukan sendiri oleh sesama anggota Non Blok itu.

Manfaat dari penulisan, sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum Internasional.



BAB 2**TINJAUAN UMUM TENTANG GERAKAN NON BLOK****2.1 Latar Belakang Lahirnya Gerakan Non Blok**

Pengertian negara-negara Non Blok ialah negara-negara yang tidak memihak ke salah satu negara yang berpengaruh atau dapat dikatakan negara-negara netral. Pecahnya Perang Dunia II mengakibatkan dunia di bagi dua blok yaitu Barat dan Timur. Kemudian negara-negara yang telah berjuang merebut kemerdekaan melepaskan diri dari kekuasaan asing, membentuk kelompok negara anti kolonialisme.

Usaha untuk menggalang kekuatan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dilakukan untuk pertama kali di Brussel pada tahun 1926, diprakarsai oleh pemuda-pemuda Asia-Afrika yang waktu itu sedang belajar di Eropa Barat. Mereka itu antara lain di hadiri oleh Jawaharlal Nehru dari India, Mohammad Hatta dari Indonesia, Ahmad Soebarjo dari Indonesia dan beberapa pemuda dari Afrika. Dalam tahun 1947 dan 1949 ketika itu bangsa Indonesia sedang melakukan perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, Nehru mengundang Mohammad Hatta dan Ahmad Soebarjo dari Indonesia serta beberapa pemuda Afrika untuk melanjutkan konsensus membentuk kekuatan menjadi kelompok negara anti penjajahan (Sumarno AP : 1989, 77).

Beberapa tahun kemudian setelah Perang Dunia II berakhir, timbul antagonis antara negara-negara Barat dan negara-negara Sosialis yang menyebabkan ketegangan-ketegangan diberbagai tempat didunia. Ketegangan antara kedua blok itu sangat mempengaruhi keadaan negara-negara Asia dan Afrika. Tak urung negara-negara Asia-Afrika menjadi ajang pertempuran. Pada tahun 1950-1954 baik di Asia dan Afrika, menjadi ajang medan pertentangan antara kedua kelompok raksasa, yaitu blok Barat dan blok Sosialis yang masing-masing dipelopori oleh Amerika Serikat serta Uni Soviet. Pertentangan ini bukan saja merupakan pertentangan ideologi, tetapi malah menjadi pertentangan dengan kekuatan senjata.

Tak sedikit negara-negara baik Asia maupun Afrika mengalami kehancuran akibat adu kekuatan senjata oleh kedua Super Power; Perang Korea menjalar ke Vietnam dan membahayakan serta membakar seluruh Asia dan Afrika. Belum lagi masalah Cina Taiwan, Palestina Afrika Utara serta beberapa kawasan lainnya. Disaat berkecamuknya medan pertempuran diberbagai kawasan itu timbul kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk saling mempertahankan hak-hak asasinya. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika secara bersama-sama bersatu membulatkan tekad untuk menghancurkan segala bentuk penjajahan.

Pada tahun 1945 tepatnya pada bulan Juni dalam pertemuan di New Delhi antara Perdana Menteri India yaitu

Jawaharlal Nehru dan Perdana Menteri RRC Chou En Lai diperoleh kesepakatan untuk makin meningkatkan kerja sama dan hubungan timbal balik, serta meningkatkan komunikasi antara negara-negara Asia-Afrika. Kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika makin lama dirasakan semakin meningkat. Ali Sastro Amidjojo yang pada tahun 1953 menjabat sebagai Perdana Menteri ikut memberikan saran-saran pada Konferensi Colombo yang berlangsung dari tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1954.

Konferensi Colombo dihadiri antara lain Perdana Menteri Unu dari Burma, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Mohammad Ali dari Pakistan, Perdana Menteri Sir John Kotelawala dari Srilanka, dan juga Ali Sastro Amidjojo dari Indonesia. Pertemuan kedua dilakukan di Indonesia tepatnya di Bogor pada tanggal 28 Desember tahun 1954 yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Bogor. Inilah awal dari penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika. Isi lengkapnya Konferensi Bogor (Sumarno AP : 1989, 79) yaitu :

- a. untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dalam bulan April 1955,
- b. menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai sponsor,
- c. menetapkan 25 negara Asia-Afrika yg akan diundang.
- d. menentukan empat tujuan pokok dalam Konferensi Asia dan Afrika yaitu :

1. memajukan kemauan baik dan kerja sama antara bangsa Asia-Afrika, serta meningkatkan kerjasama yang baik antara negara-negara Asia-Afrika,
2. meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi dan kebudayaan,
3. mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia-Afrika misalnya masalah-masalah kedaulatan nasional, rasialisme dan juga kolonialisme.
4. meninjau kedudukan Asia-Afrika dan rakyat-rakyat mereka dalam dunia pada waktu itu, serta sumbangan-sumbangan yang dapat mereka berikan dalam memajukan perdamaian dan kerjasama dunia.

Di dorong oleh keberhasilan KAA I di Bandung bulan April 1955, yang telah menyemarakkan nama dan mempertinggi martabat internasional Indonesia, Presiden Soekarno senantiasa mendukung gagasan diadakannya KAA yang pertama. Hal tersebut dapat disaksikan misalnya ketika MU-PBB menolak resolusi agar Indonesia-Belanda mengadakan perundingan mengenai Irian Barat (kini Irian Jaya), reaksi Presiden Soekarno adalah agar KAA II diadakan untuk hal tersebut. Dalam pidato HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno mengatakan, "Hemat saya diadakan secepat mungkin KAA II untuk memperbincangkan hal itu".

Tekad Indonesia dan Cina untuk mengadakan KAA II itu, rupa-rupanya tidak mendapat dukungan dari banyak negara AA. Tantangan terhadap gagasan KAA II tersebut terutama datang dari pihak PM India Nehru. Dia sangat menyangsikan kegunaan diadakan KAA II, karena menurut hemat beliau konferensi seperti itu hanya akan menampilkan perbedaan pendapat dan pendirian negara-negara Asia-Afrika. Selain dari masalah anti penjajahan, tidak banyak terdapat hal yang dapat dianggap sebagai titik pemersatu lagi di kalangan negara-negara Asia-Afrika.

Terdorong oleh kecenderungan untuk menyelamatkan diri, Tito tanpa menunggu lebih lama lagi mulai mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan hubungan yang sangat bersahabat dengan negara-negara Non Blok. Sebagai langkah pertama, Tito mulai menjalin hubungan mesra dengan Presiden Nasser dari Mesir yang dianggapnya sebagai salah seorang yang paling berpengaruh di kalangan negara-negara Non Blok. Antara tahun 1960 dan tahun 1961 terjadilah kunjung-mengunjungi antara keduanya.

Dalam pembicaraan mereka, tampak keduanya yakin bahwa mengadakan konferensi kedua seperti Bandung tidak mungkin lagi mengingat konstelasi politik yang telah banyak mengalami perubahan. Namun dibayangi oleh ketegangan dunia yang memuncak seperti krisis Berlin, kedua kepala negara itu sependapat agar negara-negara yang tidak mengikat diri kesalah satu blok berusaha mengadakan

konferensi demi meredakan ketegangan. Jika Konferensi Bandung II tidak dapat diadakan, kenapa tidak dicoba mengadakan konferensi negara-negara Non Blok untuk membicarakan masalah-masalah penting yang sedang dihadapi dunia ketika itu.

Ketika gagasan itu mulai matang dalam pemikiran kedua kepala negara, Nasser dan Tito menulis surat kepada Nehru meminta dukungannya dan sekaligus untuk bersedia menjadi kosponsor. Seperti telah diduga jawaban Nehru adalah dingin dan tidak bersedia menerimanya. Nehru telah menduga bahwa dalam konferensi seperti ini negara-negara Non Blok akan terlibat dalam debat kusir dan perang celaan terhadap negara-negara Barat yang menurut pendapatnya hanya akan memperhebat ketegangan antara kedua blok adikuasa dan akan lebih membahayakan perdamaian dunia. Berbeda dengan Nehru, Presiden Soekarno menyambut baik prakarsa Tito-Nasser tersebut, bahkan meyakinkan Presiden Tito dan Presiden Nasser bahwa Indonesia dapat dicantumkan sebagai salah satu negara sponsor dari konferensi yang direncanakan tersebut. Kesediaan Soekarno untuk menyambut prakarsa Tito-Nasser itu gampang dapat dipahami. Bagi Dia tujuan konferensi dan susunan keanggotaannya, apakah negara AA ataupun negara-negara Non Blok, tidak begitu penting. Yang penting menurutnya adalah tersedianya satu mimbar tempat untuk dapat memperkenalkan kepada dunia gagasan baru

mengenai politik luar negeri yang ingin dilancarkannya.

Dalam keadaan demikian India dihadapkan pada suatu fait accompli dan tidak punya jalan selain menerima undangan. Penolakan terhadap undangan tersebut akan berarti bahwa India akan terkucil dan akan dianggap oleh negara-negara AA terutama yang militan sebagai pengacau, jika tidak dituduh telah meninggalkan prinsip Non Blok. Bagaimanapun juga, Nehru yang enggan dan penuh prasangka akhirnya terpaksa muncul juga di Beograd untuk ambil bagian dalam konferensi yang telah dijadwalkan itu.

Negara-negara sponsor, Mesir, Yugoslavia dan juga Indonesia telah memutuskan bahwa konferensi persiapan akan diadakan pertama di Kairo untuk membicarakan hal yang erat sangkut pautnya dengan tempat, agenda dan komposisi para peserta konferensi Non Blok. Mengenai tempat diusulkan Havana, Kairo dan Beograd. Pilihan dengan mudah jatuh pada Beograd, karena Havana dianggap kurang menarik, sedangkan Kairo sudah ditentukan sebagai tempat konferensi persiapan. Sepanjang mengenai agenda telah jelas bahwa pembicaraan akan menyangkut masalah dunia.

Hal yang sangat merisaukan adalah masalah para peserta konferensi. Hal itu dapat dipahami karena selama ini belum pernah ada persesuaian paham mengenai definisi positif tentang istilah yang di sebut Nonblok dikalangan negara-negara Non Blok sendiri. Sejak Nehru mula-mula

menampilkan gagasan Nonblok pada tahun 1946, banyak negara yang telah berhasil mencapai kemerdekaannya di Asia dan Afrika. Di Afrika saja sekitar akhir tahun lima puluhan dan permulaan tahun enam puluhan kurang lebih 25 negara merdeka muncul dan semuanya memilih Nonblok sebagai prinsip politik luar negerinya.

Oleh karena itu Nonblok muncul dan dikenal dengan berbagai nama. Setiap negara mempunyai interpretasi sendiri-sendiri tentang arti Nonblok menurut selera dan kepentingan masing-masing. Indonesia misalnya menyebut politik Nonbloiknya Politik Bebas Aktif. Ben Bella dari Algeria menyebut politik luar negerinya *dynamic independence*, sedangkan negara Nonblok lainnya memberi beraneka ragam nama terhadap politik luar negerinya seperti *non-engaged*, *non-committed*, *constructive neutrality*, *positive neutrality*, *active neutrality* dan sebagainya.

Tidak mengherankan, jika tidak mudah memberi definisi yang tepat mengenai Nonblok. Ada yang menguraikannya sebagai satu doktrin politik luar negeri yang mempunyai tujuan khusus untuk mengurangi ancaman perang dan mencegah meletusnya pertarungan militer antara kedua negara adikuasa. Diplomasinya berdasarkan kebebasan bertindak dan memilih dalam kaitannya dengan masalah-masalah internasional.

2.2 Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Non Blok.

Sebagai persiapan, dari tanggal 5 sampai 12 Juli tahun 1961 di Kairo diadakan sebuah pertemuan yang hadir 20 negara yakni Afganistan, Arab Saudi, Burma, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Kamboja, Kuba, Mali Maroko, Nepal, Republik Persatuan Arab (konfederasi Mesir Suriah), Srilangka, Somalia, Sudan, Yaman dan Yugoslavia. Selain itu pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Brasil sebagai peninjau.

Setelah melalui perdebatan yang hangat pertemuan berhasil menyusun agenda bagi KTT Nonblok yang di tetapkan di Beograd tanggal 1-6 September 1961 dan kriteria bagi negara-negara yang dapat diundang menjadi peserta. Adapun agenda yang disiapkan oleh pertemuan Kairo itu (LKBN: 1985 hal 46).

A. Bidang Politik

1. Bertukar pandangan mengenai situasi internasional.
2. Membahas hak-hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara.
3. Perjuangan melawan diskriminasi rasial serta apartheid.
4. Perlucutan senjata secara total, larangan percobaan senjata nuklir dan anti pangkalan militer asing.
5. Hidup berdampingan secara damai antarnegara tanpa memandang perbedaan sistem sosial dan politik.

Sely di terma...

6. Peranan dan struktur PBB serta implementasi resolusi-resolusinya.

B. Bidang Ekonomi

1. Memecahkan masalah pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara negara-negara di dunia.
2. Peningkatan kerjasama ekonomi dan bantuan teknik.

Mengenai negara-negara yang dapat diundang menjadi peserta KTT, pertemuan menetapkan harus memenuhi syarat-syarat Non Blok yang kemudian dikenal sebagai "Kriteria Kairo" sebagai berikut :

1. Negara itu harus menganut politik bebas yang didasarkan pada hidup berdampingan secara damai antarnegara dengan sistem politik dan sosial yang berbeda dan pada politik Non Blok atau memperlihatkan kecenderungan menyetujui politik itu.
2. Negara bersangkutan harus senantiasa mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional.
3. Negara itu harus tidak menjadi anggota sebuah persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka konflik kekuatan-kekuatan besar.
4. Apabila sebuah negeri punya perjanjian militer bilateral dengan sebuah pakta pertahanan regional, perjanjian itu tidak boleh dalam kerangka konflik kekuatan-kekuatan besar.
5. Apabila negeri itu telah menyetujui pangkalan militer asing di wilayahnya, maka persetujuan itu

harus tidak dibuat dalam rangka konflik kekuatan besar (LKBN : 1985, 47).

Pada waktu diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama di Beograd 1961, dalam deklarasinya telah diletakkan prinsip-prinsip dasar Non Blok dimana anggotanya telah sepakat untuk menghormati serta menjunjung tinggi dan melaksanakannya. Agar tetap ditaatinya pelaksanaan prinsip dasar Gerakan Non Blok tersebut, sejak semula selalu ditegaskan dalam berbagai deklarasi yang dihasilkan oleh konferensi-konferensi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip Dasa Sila Bandung Tahun 1955. Prinsip itu antara lain meliputi :

- a. Mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan pelaksanaan universal dari prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai.
- b. Kemerdekaan Nasional, kedaulatan, integritas wilayah, persamaan derajat dan kebebasan setiap negara untuk melaksanakan pembangunan dibidang sosial, ekonomi dan politik.
- c. Kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang masih berada dibawah jajahan dan dominasi asing.
- d. Menghormati hak asasi dan kemerdekaan yang fundamental.
- e. Menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, perbedaan warna kulit termasuk

zionisme dan segala bentuk ekspansi, dominasi serta pemusatan kekuasaan.

- f. Menolak pembagian dunia atas blok atau persekutuan militer yang saling bertentangan satu dengan lainnya, penarikan semua kekuatan militer asing, mengakhiri semua pangkalan asing dan penolakan terhadap doktrin yang sudah usang seperti lingkungan pengaruh dan politik adu kekuatan.
- g. Menghormati batas-batas wilayah internasional yang sah dan diakui serta menghindari campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain.
- h. Menyelesaikan persengketaan dengan cara damai.
- i. Perwujudan suatu tata ekonomi dunia baru.
- j. Memajukan kerjasama internasional berdasarkan asas persamaan derajat.

Ke-sepuluh prinsip itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip PBB sebagaimana yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights yang secara prinsipal memuat nilai-nilai asasi dari hak-hak asasi manusia dengan tidak memandang warna kulit, idiologi serta sistem politik yang berlaku dalam suatu negara.

2.3 Tujuan Pokok didirikan Gerakan Non Blok

Dalam prinsip-prinsip tersebut diatas, negara-negara anggota Gerakan Non Blok telah mencurahkan perhatian serta upaya-upaya kearah realisasi dari tujuan pokok yaitu :

1. Melanjutkan usaha ke arah perdamaian dunia dan hidup berdampingan secara damai dengan jalan memperkuat peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi salah satu alat yang lebih efektif bagi usaha-usaha perdamaian dunia, kedaulatan serta integrasi wilayah dari semua negara.
2. Menyelesaikan persengketaan Internasional diantara negara-negara anggotanya secara damai.
3. Mengusahakan tercapainya perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan Internasional.
4. Menolak persekutuan militer dengan suatu kekuasaan raksasa serta pangkalan militer maupun pasukan asing dalam wilayah suatu negara yang ditujukan dalam rangka konflik negara besar.
5. Memerangi kolonialisme, rasialisme dan apartheid.
6. Memperjuangkan kemerdekaan dibidang ekonomi dan kerjasama timbal balik atas dasar persamaan derajat bagi keuntungan bersama.
7. Memperkuat efisiensi secara keseluruhan PBB.

8. Demokratisasi dalam hubungan internasional sehingga setiap negara mempunyai hak untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional.
9. Meneruskan usaha-usaha di antara negara-negara berkembang maupun dengan negara maju untuk tujuan menata kembali ekonomi dunia dalam keadaan lebih adil dan merata.
10. Memajukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan politik di antara semua negara untuk melindungi keamanan dan perdamaian dunia.
11. Memelihara dan memperkuat persatuan Gerakan Non Blok melalui kerjasama serta konsultasi antara sesama anggota Gerakan Non Blok.

Dalam upaya mencapai tujuan ini, Gerakan Non Blok melakukan kegiatan-kegiatan dapat dibagi dalam lima program yang disingkat "Program 5 P" (Sumarno Ap, 1989, hal 216)

1. Perlucutan senjata
2. Pembangunan ekonomi negara berkembang
3. Peredahan ketegangan internasional
4. Persamaan hak dalam hubungan internasional
5. Perjuangan kemerdekaan rakyat yang dijajah.

BAB 3
KEDUDUKAN GERAKAN NON BLOK MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL

3.1 Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional.

Istilah organisasi internasional dalam tatanan hukum internasional mempunyai pengertian ganda. Ia dapat digunakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Organisasi internasional dalam arti luas digunakan untuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (internasional), baik yang bersifat publik maupun privat. Organisasi internasional dalam arti sempit, hanya menunjuk setiap organisasi internasional yang bersifat publik. (J. Pareira Mandalangi, 1986 hal 1).

Dengan melihat pengertian organisasi internasional dalam arti luas dan dalam arti sempit sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Pareira Mandalangi tersebut, maka dapatlah disimpulkan, organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk baik oleh pemerintah dari beberapa negara maupun oleh warga negara dari berbagai negara.

Pengertian organisasi internasional sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan pengertian itu merupakan pengertian organisasi internasional dalam arti luas, meliputi :

1. Setiap organisasi yang dibentuk atau didirikan oleh pemetintah-pemerintah, dan
2. Setiap organisasi yang tidak dibentuk/didirikan oleh pemerintah-pemerintah tapi melintasi batas-batas wilayah dari suatu negara.

Disamping pengertian organisasi internasional tersebut di atas juga pembentukan setiap organisasi internasional itu juga harus berdasarkan suatu perjanjian, dimana tiga atau lebih negara yang menjadi peserta. Hal ini dipertegas oleh J. Pareira Mandalangi (1986, hal 6) yang mengatakan organisasi internasional dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis, yang sekurang-kurangnya dilakukan oleh tiga negara/pemerintah-pemerintah, termasuk organisasi-organisasi internasional yang sudah ada.

Dan organisasi internasional tidak hanya perhimpunan yang dibentuk oleh pemerintah suatu negara saja tetapi non pemerintah juga dapat membentuk sebuah organisasi. Inilah yang disebut pengertian organisasi internasional dalam arti yang luas. Seperti apa yang telah dikatakan oleh D.W. Bowett (1992, hal 5) bahwa perhimpunan/perserikatan juga dapat dibentuk dari kesadaran-kesadaran non pemerintah, baik swasta individu atau badan hukum dimana kepentingan perhimpunan tersebut mempunyai karakter internasional, seperti Konvensi Dunia Anti Perbudakan atau World Anti Slavery Convention 1840.

Dari pengertian organisasi dalam arti luas dan yang dibentuk berdasarkan konvensi (ini menjadi konstitusi), maka organisasi internasional tersebut mempertegas eksistensinya sebagai subyek hukum internasional (Mochtar Kusumaatmadja: 1982, hal 95).

Meningkat dan berkembangnya hubungan internasional (internasional relation) secara kompleks menimbulkan tumbuh berbagai organisasi internasional, dan hal semacam ini harus dihadapi oleh dunia sebagai suatu proses untuk mengadakan tatanan ketertiban (order) yang lain. Negara-negara anggota walaupun tetap merupakan kesatuan-kesatuan politik yang cukup berpengaruh, organisasi internasional dapat menjalankan fungsinya yang berguna dalam lingkungan sistem negara. Pada waktu itu organisasi semacam ini lebih merupakan sebagai kesatuan dari sistem politik yang baru.

Organisasi internasional dapat memainkan peranan yang cukup penting, antara lain didalam mencari upaya ke arah kerjasama di antara berbagai negara disuatu bidang dimana organisasi itu dapat memberikan manfaat bagi semua negara atau sejumlah negara-negara anggotanya. Disamping itu organisasi internasional dapat merupakan saluran untuk mengadakan komunikasi di antara pemerintah, dengan demikian apa yang dapat disepakati bersama dapat dijajaki dan bilamana masalah akan timbul akan dapat diatasi dengan mudah.

Disamping itu pula organisasi internasional dewasa ini dalam batas-batas tugas dan wewenangnya telah mampu menciptakan dan membentuk prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional baik yang berlaku khusus dikalangan anggota organisasi internasional itu sendiri maupun yang dapat berkembang menjadi prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku umum atau universal. Prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional yang lahir dari organisasi-organisasi internasional yang dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan boleh dipandang memiliki derajat yang sama dengan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum internasional lainnya. Dalam pada itu Leroy Bennet (Syahmin Ak : 1987, 31) mengemukakan, bahwa organisasi internasional itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. A permanent organization to carry on a continuing of set of functions.
2. Voluntary membership of eligible parties.
3. Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation.
4. A broadly representative consultative conference organ.
5. Permanent secretariat to carry on continuous administrative, reseach and information functions.

3.2 Analisis Gerakan Non Blok sebagai Satuan (entity) Internasional.

GNB adalah kerjasama negara Berkembang yang tidak berlembaga. Hal ini sering disebut sebagai kekurangan bahkan kelemahannya. Tetapi hebatnya disinilah terletak dinamika Non Blok, karena kekuatannya justru terletak dalam kelemahannya itu. Satu dari contohnya adalah soal sekretariat ini. Non Blok selama hidupnya terus dapat beroperasi dan bertahan tanpa adanya satu sekretariat seperti umumnya dimiliki oleh badan kerjasama lain.

Bagaimana dapat dijamin kelancaran operasinya merupakan satu pertanyaan yang sering diajukan dan kadang kala sukar dijawab. Rahasianya terletak dalam kenyataan masing-masing negara anggota rela berkorban untuk mengambil bagian dalam pengurusannya secara sendiri-sendiri dan secara kolektif. Untuk menjaga agar koordinasi antara kegiatan-kegiatannya dapat dijamin dengan baik, maka diadakan konsultasi berkala secara bilateral dan multi-lateral pada setiap kesempatan yang biasanya telah tersedia seperti diwaktu sidang MU-PBB dimana hadir semua wakil-wakil negara Non Blok.

Sudah menjadi tradisi bahwa setiap tiga tahun diadakan KTT di negara Non Blok yang telah ditentukan dan setiap tahun KTM di Markas besar PBB atau ditempat lain yang disetujui bersama. Kemudian kepala perwakilan tetap negara-negara Non Blok di PBB mengadakan pula sidang

bulanan atau setiap kali dianggap perlu. Untuk menyiapkan KTT tugasnya diserahkan pula kepada panitia persiapan. Rentetan pertemuan ini menjamin tercapainya koordinasi yang rapi dan operasi yang lancar. Dengan demikian Gerakan Non Blok dapat bergerak tanpa adanya Sekretariat tetap dan pula tanpa biaya yang memberatkan.

Oleh karena GNB yang tidak memiliki aturan permainan dalam hal ini konstitusi, tetapi dalam segi perannya maka GNB dapat dikatakan sebagai entity (satuan) internasional. GNB lahir hanya berdasarkan konferensi Tingkat Tinggi negara-negara yang berkembang yang tidak pernah mencetuskan suatu deklarasi permanen tentang keberadaannya sebagai organisasi internasional yang memiliki Internasional personality baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Karena dalam basic instrumen semacam konstitusi inilah biasa dirumuskan secara tegas mengenai tujuan suatu organisasi internasional, serta ketentuan seperti keanggotaan, sekretariat tetap dan aturan lain yang mencerminkan sebagai organisasi internasional yang memiliki internasional personality. Kelemahan lain dari GNB, yaitu pengertian organisasi internasional, GNB tidak memenuhi secara sempurna apa yang telah dirumuskan mengenai pengertian organisasi internasional. GNB hanya dinyatakan lahir pada saat berlangsungnya KTT pertama di Beograd, Yugoslavia tahun 1961. Dalam KTT pertama ini tidak dirumuskan suatu

deklarasi yang permanen tentang bentuk, tujuan, keanggotaan, sekretariat dan ketentuan lain sehingga GNB tidak dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional yang dapat menjadi subyek hukum internasional. Tidak seperti PBB dan ASEAN. Kelahiran PBB diawali dengan berbagai konferensi yang puncaknya konferensi di San Fransisco tahun 1945, melahirkan Piagam PBB. Dalam Piagam ini dirumuskan secara tegas dan jelas tujuan keanggotaan dan sekretariat tetap PBB. Begitupun ASEAN, lahir dengan sebuah deklarasi di Bangkok tahun 1967, sehingga eksistensi ASEAN sebagai organisasi internasional di rumuskan dalam Deklarasi Bangkok tersebut.

Baik Piagam maupun Deklarasi Bangkok dapat di katakan konstitusi dari PBB dan ASEAN. Karena dalam piagam dan Deklarasi dapat ditemukan prinsip esensial suatu organisasi internasional, yaitu legal personality yang menjadi dasar sehingga organisasi tersebut dapat menjadi subyek hukum internasional.

Konsekuensi dari pemilikan international personality suatu organisasi internasional adalah kemampuan untuk melakukan aktifitas baik dalam wilayah negara yang menjadi anggotanya serta dapat melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara dan organisasi internasional lainnya. Gerakan Non Blok sejak awal berdirinya pada tahun 1961 sampai KTT XI tahun 1995, tidak pernah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan

negara atau organisasi internasional lain atas nama GNB.

GNB sampai saat ini tindakan yang sering dilakukan adalah berupa seruan yang tidak mempunyai kekuatan Yuridis, Apa yang dilakukan GNB selama ini hanya bersifat moral belaka. GNB hanya sebagai suatu sarana bagi kumpulan dari beberapa negara dalam mendukung usaha-usaha PBB sebagai organisasi internasional terbesar saat ini dalam memecahkan masalah-masalah internasional, hal ini dapat dilihat dalam dokumen akhir KTT GNB ke-10 yang menekankan keterkaitan pada tujuan dan prinsip piagam PBB. Para kepala negara/pemerintahan, yang mengikuti KTT ke-10 mengatakan pula bahwa PBB adalah forum yang paling tepat dalam memecahkan masalah internasional untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, penyelesaian konflik secara damai serta memberikan jaminan akan kehormatan hak-hak asasi manusia (HAM), hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan hak-hak kebebasan lainnya, mewujudkan kesejahteraan serta emansipasi sosial yang seimbang, adil dan meningkatkan persahabatan antarbangsa. Negara-negara yang bergabung dalam GNB memperjuangkan agar PBB dapat lebih tanggap terhadap kenyataan-kenyataan dan tantangan yang ada dalam mengembangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luas secara damai. Menyadari kepentingan arti multilateralisme dan dalam kaitan ini mempertegas komitmennya atas tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Peranan PBB

mempunyai pengaruh yang makin meningkat dalam masalah-masalah dunia sebagai satu-satunya acuan kerangka yang bersifat universal yang mengatur hubungan internasional dengan tujuan mencapai perdamaian, perlucutan senjata, pembangunan dan kohesi untuk memperkuat kerja/usaha PBB dengan cara demokratis, efektif dan efisien agar dapat memperkuat kesanggupan PBB dalam menangani tantangan-tantangan saat ini. Dengan adanya masalah-masalah pembangunan yaitu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan kritis dari negara-negara berkembang, maka PBB diyakini sebagai suatu badan yang mewakili forum yang paling layak untuk menjaga dan mempertahankan perdamaian, keamanan dan penyelesaian pertikaian secara damai demi pencapaian kebebasan dan hak penentuan nasibnya sendiri dengan menyediakan suatu wadah untuk kerjasama yang berguna serta dialog yang demokratis. Namun demikian anggota GNB berpendapat untuk mengaktifkan usahanya, maka mekanisme PBB memerlukan tatanan ulang dan diselaraskan sesuai dengan mandat yang tercatat dalam piagam yaitu adanya keseimbangan di antara para anggota PBB agar mencerminkan realita-realita baru dalam situasi internasional yang berubah-ubah sehingga PBB akan lebih responsif terhadap perkembangan/situasi hubungan internasional yang nyata dan tantangan-tantangan yang menyangkut perdamaian dan pembangunan dalam konteks yang lebih dinamis.

Para kepala negara/pemerintahan GNB menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses adaptasi dan reformasi dengan berpegang teguh pada pendirian bahwa PBB sebagai komponen yang esensial untuk memperkuat multilateralisme sehingga merupakan forum yang mutlak harus didukung dan diperkuat dalam menjalankan prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran Piagam PBB. Usaha yang ditujukan untuk informasi dan memperbaiki struktur-struktur dan prosedur dengan tujuan partisipasi yang berimbang, perwakilan yang lebih seimbang atau demokratisasi politik internasional dan konstitusi-konstitusi ekonomi merupakan akibat dari adanya hambatan-hambatan oleh pihak-pihak yang mempertahankan hak-hak dan kekuasaan istimewa. Pada dasarnya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional memerlukan tatanan ulang dalam mekanisme PBB dan adanya keseimbangan antar anggota. Untuk mewujudkan antara lain dengan melaksanakan hubungan yang berimbang antara MU, DK dan Sekretaris Jenderal sesuai Piagam PBB. Juga diharapkan agar negara-negara adidaya untuk menerima proses yang tidak dapat dielakan ini berlandaskan kepentingan umat manusia dalam konteks yang lebih luas. Respon politik yang terkoordinir harus diwujudkan oleh negara-negara Non Blok untuk memajukan peranan MU sebagai forum pertimbangan, negosiasi dan pengambilan keputusan dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut organ tambahan

Dewan Ekonomi dan Sosial serta Dewan Keamanan PBB.

GNB merasa perlu untuk tetap mentaati percepatan proses ini yang berarti perlengkapan PBB akan benar-benar tanggap terhadap kebutuhan negara-negara berkembang yang semakin meningkat, dan bertekad mendukung usaha-usaha PBB dalam meningkatkan kemampuan diplomasi preventif, tindakan-tindakan untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dunia di mana telah banyak anggota GNB yang ditugaskan.

GNB bertekad untuk turut memberikan sumbangan dalam mengadakan penyesuaian struktur, prosedur dan tata kerja yang sudah ada (restrukturisasi), lebih memanfaatkan apa yang telah ada (revitalisasi) dengan lebih merefleksikan kenyataan-kenyataan.

PERANAN GERAKAN NON BLOK DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK INTERNASIONAL

4.1 Perkembangan Tata Hubungan Masyarakat Internasional.

Sejak awalnya eksistensi GNB diarahkan pada tujuan untuk menghadapi situasi dunia yang kontradiktif secara ideologi dengan situasi Perang Dingin yang memuncak disalah satu pihak dan pada pihak lain ditandai dengan ketimpangan, ketidakadilan serta ketidakdemokratisan, jurang yang lebar antara negara yang kaya dan negara miskin dan gejala timbulnya neoimperialisme. Oleh karena itu sejak pertama kali GNB dicetuskan pada 1961, sudah jelas terlihat adanya tekad dari negara-negara yang mayoritas baru memperoleh kemerdekaan ini untuk melancarkan apa yang disebut sebagai "aksi politik" dalam menghadapi situasi dunia tadi.

Para pemimpin negara yang peduli pada bahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia akan pecahnya Perang Dunia III, terdorong untuk menjadi penengah dalam rivalitas kedua blok. Mereka adalah Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Ghana, Presiden Soekarno dari Indonesia, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, dan Presiden Yosif Bros Tito dari Yugoslavia. Kelima pemimpin negara berkembang ini memprakarsai suatu pertemuan di Markas Besar PBB di New York pada September 1960 yang dikenal sebagai

"Prakarsa Lima Kepala Negara". Pertemuan yang diadakan disela-sela sidang MU-PBB yang ke-15, berhasil mengeluarkan suatu Komunike Bersama yang memuat aksi politik, antara lain : Departemen Luar Negeri RI, 1992, hal 85)

1. Menghimbau negara-negara Adidaya agar segera berunding guna menghentikan perlombaan senjata atom dan nuklir dalam rangka memulihkan perdamaian dan keamanan internasional;
2. Mendesak Sekjen PBB agar dibentuk suatu mekanisme di PBB guna mengatur dan mempercepat proses kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah;
3. Menghimbau kepada negara-negara maju agar memberikan bantuan dari sebagian kecil GNP mereka kepada negara-negara berkembang dalam usaha memperkecil jurang kemiskinan antara negara maju dan negara berkembang.
4. Menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok sekitar tahun 1961 menjelang diadakan Sidang Majelis Umum PBB ke-16.

Prakarsa Lima Kepala Negara yang lebih dikenal sebagai The Initiative of Five inilah yang mengawali sejarah timbulnya GNB yang sampai sekarang ini dan sekaligus meletakkan Lima Negara tersebut "Pendiri Utama" GNB, sedangkan 22 negara lainnya yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 di Beograd tahun 1961 merupakan pendiri GNB. Sejak itu setiap tiga tahun

GNB selalu menyelenggarakan KTT kecuali KTT ke-3 di Lusaka tahun 1970 yang diadakan enam tahun 1964 yang disebabkan adanya Perang Timur Tengah dan Perang Vietnam. Namun setelah KTT ke-3 di Lusaka, KTT-KTT berikutnya secara teratur diadakan setiap tiga tahun.

Dalam perjalanan sejarah sejak selama tahun 1961 sampai sekarang, setiap penyelenggaraan KTT, mempunyai momentum tersendiri.

1. KTT Non Blok I di Beograd 1961

Diadakan pada saat memuncaknya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, yang ditandai dengan krisis Berlin, percobaan peledakan bom atom/nuklir yang dilakukan oleh Unisoviet. Di lain pihak perjuangan gerakan-gerakan pembebasan nasional di berbagai kawasan seperti Asia, Afrika dan Timur Tengah telah meningkat. GNB telah mengajukan kepada kedua blok agar kedua negara adidaya segera berunding guna mengurangi pacuan senjata. GNB juga menyerukan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi di antara negara-negara berkembang.

2. KTT Non Blok II di Kairo 1964

Seiring dengan peningkatan kegiatan-kegiatan GNB. Pada saat bersamaan timbul konflik Pakistan-India, India-RRC disamping krisis Timur Tengah dan krisis Kongo yang makin gawat. Hubungan Amerika Serikat dan Uni soviet juga tengah tegang akibat krisis "Teluk Babi" yaitu rencana

Uni soviet untuk membangun instalasi senjata nuklir di Kuba. Pada KTT ini GNB mengeluarkan suatu "Rancangan untuk perdamaian dan kerjasama internasional" yang tersusun dalam deklarasi mengenai masalah-masalah yang perlu dipecahkan demi perdamaian internasional. GNB pada saat itu juga telah meletakkan cita-cita mereka untuk mempercepat proses dekolonisasi; penyelesaian sengketa dan hidup berdampingan secara damai.

3. KTT Non Blok III di Lusaka 1970

Semakin menghadapi permasalahan dunia yang kuat. Aksi-aksi agresi, penggunaan kekerasan dan campur tangan asing di negara-negara yang baru merdeka terus berlangsung, seperti tercermin dalam perang Vietnam dan pendudukan wilayah-wilayah Arab secara tidak sah oleh Israel. KTT ini menghasilkan deklarasi yang isinya menuntut demokratisasi dalam hubungan internasional serta persamaan hak, mendukung dikembalikannya kursi Cina kepada RRC di PBB serta melahirkan suatu "Deklarasi tentang kerjasama Ekonomi" khususnya program aksi yang menyangkut kerjasama, pembangunan industri dan perdagangan. GNB juga telah melancarkan suatu gagasan mengenai "Samudera Hindia sebagai Zona Damai".

4. KTT Non Blok IV di Aljasair 1973

Yang dalam deklarasinya telah meletakkan suatu landasan untuk menciptakan hubungan internasional yang lebih adil dan saling menguntungkan melalui suatu konsep

Tata Ekonomi Dunia Baru. Selain itu diusulkan juga dilaksanakan prinsip non diskriminasi dan preferensial terhadap negara-negara berkembang, perluasan sistem umum preferensi (GSP) dan pembaharuan peraturan GATT.

Deklarasi itu selanjutnya menekankan tentang :

- a. Pembentukan dana pembangunan ekonomi dan sosial yang terbuka bagi keikutsertaan semua negara Non Blok.
- b. Pengawasan pemerintah terhadap penanaman modal asing.
- c. Sebuah kode etik (code of conducts) perusahaan transnasional dan multinasional.
- d. Kedaulatan nasional terhadap sumber-sumber alam.
- e. Alih teknologi.
- f. Alam lingkungan.
- g. Program aksi ECDC (Economic Cooperation among Developing Countries) atau kerjasama selatan-selatan.

Keputusan-keputusan lain KTT antara lain resolusi boikot terhadap Israel, pengakuan terhadap pemerintah Sihanouk di Kamboja, langkah-langkah membantu negeri-negeri tak berpantai, dan penyidangan sebuah konferensi bersama FAO dan UNCTAD untuk meneliti kekurangan pangan dunia.

5. KTT Non Blok V di Kolombo 1976

Diwarnai oleh situasi dunia Pasca Perang Vietnam tahun 1975. Di samping itu GNB juga telah menggunakan momentumnya untuk mengadakan penilaian terhadap situasi ekonomi dan masalah pembangunan dengan memusatkan

perhatiannya pada penyelenggaraan Sidang Khusus MU-PBB yang ke-6 dan ke-7 mengenai pembangunan ekonomi bagi negara berkembang, yang kemudian merintis dialog antara Utara-Selatan pada tahun 1978 dan diselenggarakan di kota Cancun, Meksiko. Di bidang kerjasama ekonomi antara negara-negara Non Blok dan Negara berkembang lainnya telah menetapkan Program aksi diberbagai bidang seperti perdagangan bahan mentah, kerjasama keuangan dan moneter, industrialisasi, pangan dan pertanian, perikanan, telekomunikasi dan juga iptek serta turisme.

6. KTT Non Blok VI di Havana 1979

Diselenggarakan pada saat situasi dunia di tandai invasi Uni soviet ke Afganistan yang merusak detente dan menyebabkan situasi kembali ke Perang Dingin. Di samping itu antara sesama anggota GNB sendiri muncul pertentangan. Masalah-masalah Sahara Barat, invasi Vietnam ke Kamboja, dan konflik Iran-Irak, telah menimbulkan peperangan. Selain itu, GNB dinilai telah banyak meninggalkan prinsip-prinsip dan tujuan utama sejak didirikan 1961 yaitu dengan timbulnya thesis apa yang disebut "Persekutuan Alamiah" yang disusul dengan keluarnya Myanmar dari GNB. Dibidang ekonomi telah dicetuskan suatu gagasan mengenai peluncuran Negosiasi Global sebagai langkah pertama kearah tercapainya Tata Ekonomi Dunia Baru, disamping usaha-usaha untuk membentuk Program Komoditi Terpadu dan bersama.

7. KTT Non Blok VII di New Delhi 1983

Diselenggarakan ditengah situasi dunia yang diliputi suasana meningkatnya Perang Dingin antara negara-negara adidaya dengan ditandainya perlombaan senjata nuklir dan resesi ekonomi dunia yang meluas dan berkepanjangan.

Sementara itu situasi di Afganistan akibat invasi Uni Soviet dan campur tangan Vietnam di Kamboja, Perang Iran-Irak, masih belum dapat diatasi. GNB melalui KTT ke-7 telah mengeluarkan New Delhi Messages yang mendesak negara-negara adidaya agar menghentikan perlombaan senjata nuklir dan dalam mengatasi krisis ekonomi mengimbau agar negara-negara maju segera mengadakan perundingan untuk usaha-usaha kearah perubahan struktur perekonomian dunia. KTT ke-7 juga telah berhasil dalam mengembalikan prinsip-prinsip umum dan tujuan pokok GNB dari penyimpangan-penyimpangan yang selama ini pernah terjadi. Dibidang kerjasama ekonomi diantara negara-negara berkembang telah dikeluarkan suatu deklarasi tentang Kemandirian Bersama.

8. KTT Non Blok VIII di Harare, Zimbabwe 1986.

Berlangsung di tengah situasi Perang Iran-Irak yang masih berlangsung dan situasi di Afganistan masih juga belum dapat diatasi. Sementara itu PBB baru saja mengadakan Sidang Khusus Majelis Umum mengenai situasi ekonomi di Afrika yang sangat kritis dan telah menetapkannya

program aksi PBB untuk memulihkan ekonomi dan pembangunan Afrika. KTT ke-8 ini juga ditandai situasi ekonomi Amerika Latin yang menghadapi beban hutang yang sangat berat. Menurunnya harga minyak dan kemelut pasaran komoditi serta proteksionisme membawa dampak negatif bagi perekonomian negara-negara berkembang umumnya. GNB juga menyambut adanya Tahun Perdamaian PBB tahun 1986 yang dikeluarkan oleh PBB dan mendesak agar PBB segera mengambil langkah memperkokoh perdamaian dunia.

9. KTT NON BLOK IX di Beograd 1989

Sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik glasnost dan perestroika yang di canangkan oleh Presiden Gorbachev dari Uni Soviet, yang telah membawa perubahan dalam hubungan internasional. Situasi semacam ini telah membawa perpecahan di berbagai negara di Eropa Timur karena telah terjadi proses sosial yang cukup mendasar mengakibatkan hilangnya paham hegemonisme Uni Soviet terhadap negara-negara Eropa Timur tersebut. Walaupun iklim politik dunia sudah agak membaik, perdamaian masih belum mantap. Bahkan situasi di Timur Tengah makin buruk dan telah ditandai oleh intifada, dimana KTT mendesak segera di selenggarakan konferensi internasional mengenai Timur Tengah. Namun hal yang menggembirakan adalah inisiatif dua negara adidaya untuk mengurangi persenjataan dunia dan angkatan bersenjata mereka yang cukup besar, telah meredakan kembali ketegangan dunia.

10. KTT Non Blok X di Jakarta 1992.

Diselenggarakan pada saat dunia ditandai oleh perubahan-perubahan yang radikal dan cepat didalam hubungan internasional. Situasi semacam ini telah memberi kesempatan yang besar sekali kepada GNB untuk memainkan peranan di dalam hubungan internasional. Sementara itu hubungan Timur Barat yang selama ini diwarnai oleh pertentangan-pertentangan telah mulai memasuki era kerjasama. Dengan demikian sekaligus telah menandai usainya Perang Dingin dan berakhirnya pertentangan.

Pesan-pesan hasil dari KTT ke X antara lain :

"9. Kami merasa tidak senang dengan perkembangan yang dibuat dalam perlombaan persenjataan nuklir dan konvensional yang tidak terbatas. 10. Sekarang perdamaian dan stabilitas tergantung kepada masalah sosial ekonomi, sebagian juga pada politik dan militer. 11. Kami menaruh perhatian yang mendalam terhadap dampak negatif dari pengeluaran militer terhadap perekonomian dunia.... 13. Gerakan kami menaruh komitmen untuk memerangi kemiskinan, buta huruf dan keterbelakangan"

11. KTT Non Blok XI di Kolombo 1995.

KTT ini kemudian mengeluarkan seruan Kolombia (The Call from Colombia), seruan yang pertama menyatakan GNB akan melanjutkan usulan restrukturisasi, revitalisasi dan demokratisasi PBB berdasarkan prinsip yang terkandung dalam piagam PBB.

Seruan Kolombia ini juga menegaskan tekad untuk melanjutkan upaya tercapainya perlucutan senjata secara menyeluruh, termasuk perlucutan pemusnahan senjata nuklir. Isi seruan Kolombia juga menentang semua jenis

syarat dan langkah sepihak yang berusaha didesakkan pada anggota. Dari Kolombia ini juga keluar desakan untuk menghapus sisa-sisa kolonialisme dan pendudukan asing serta menentang kecenderungan campur tangan baru dan hegemoni.

GNB akan mempertahankan seruannya untuk pembatalan utang negara-negara berkembang, termasuk utang yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang yang berpendapatan rendah.

Seruan Kolombia ini memberikan mandat kepada Presiden Kolombia Ernesto Samper sebagai ketua GNB untuk menyampaikan pesan ini kepada pertemuan Kelompok G-7. Ia juga diminta memajukan kerjasama Selatan-Selatan, membentuk grup guna memberikan rekomendasi bagi operasi dan prosedur serta tindakan GNB. Selain itu Samper diberi tugas membentuk komite yang tugasnya mempelajari dan melaksanakan tindakan-tindakan GNB untuk memperbaiki situasi sosial negara anggota.

Agar GNB lebih bermanfaat lagi, tidak sekedar bertemu 3 tahun sekali, muncul gagasan agar dibentuk sebuah mekanisme seperti diusulkan Menlu Iran Ali Akbar Velayati dan PM Pakistan Ny. Benasir Bhutto dalam debat umum. Menlu Singapura Jayakumar, secara lebih konkrit lagi mengusulkan dibuatnya cetakan biru (blue print) agar semua rencana akhirnya bisa diwujudkan. KTT di Kartagena harus menyetujui sebuah cetak biru agar bertindak

konkrit. Dalam menggiatkan kerjasama ekonomi, GNB jangan sampai tersingkir dari dinamika ekonomi dunia yang sedang berkembang terus.

4.2 Relevansi Gerakan Non Blok Sebagai Wadah Perjuangan Negara Berkembang.

Gerakan Non Blok lahir dalam suasana ketika dunia dicekam oleh ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Oleh karena itu ada anggapan bahwa Non Blok produk Perang Dingin. Apabila terjadi detente seperti dalam era Nixon-Brezhnev atau peredaan ketegangan seperti dalam era Reagen-Gorbachev yang berlanjut sampai sekarang, maka Non Blok di hadapkan kepada pertanyaan, apakah kini masih relevan, karena Perang Dingin sudah di anggap lenyap dan kedua raksasa itu sudah damai.

Pertanyaan seperti ini harus mendapat jawaban yang tepat dan tuntas, karena menyangkut raison d'etre Gerakan Non Blok. Pertanyaan itu sebenarnya menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kesalah-pahaman dan kurang pengertian terhadap esensi Gerakan Non Blok dan tujuannya. Oleh karena hal tersebut dianggap perlu untuk menguraikan sedikit lebih terinci kenapa Gerakan Non Blok diciptakan dan apa sebenarnya yang menjadi sasarannya.

Ada pepatah Afrika yang mengatakan apabila dua ekor gajah berkelahi, maka rumput akan berantakan. Di Asia pepatah yang sama diungkapkan dalam bentuk lain : apabila

dua ekor harimau bertempur dilembah, maka monyet-monyet menonton di puncak bukit (M. Sabir, 1990). Pepatah tersebut sering dipakai untuk mencerminkan esensi dan pengertian Non Blok bahwa dalam dunia yang dikuasai dua negara adikuasa, negara kecil sebaiknya memang jangan ikut-ikut.

Pepatah itu pada hakikatnya melukiskan dengan baik sekali bagaimana negara kecil bersikap dalam menghadapi negara raksasa. Namun pepatah demikian mengutarakan pengertian yang tidak seluruhnya tepat, karena memberikan gambaran hanya sepihak mengenai gajah dan harimau. Memang diakui bahwa bahayanya dapat lebih besar jika mereka sedang berkelahi. Tetapi dilihat dari segi kepentingan negara kecil tidak kurang pula bahayanya jika mereka tidak sedang berkelahi.

Di masa Perang Dingin atau damai (detente) negara-negara kecil tetap dituntut kesediaannya untuk mengatur diri mereka diluar konteks negara besar, dan dalam hal ini Gerakan Non Blok tetap merupakan satu-satunya wadah yang tepat. Sebab dalam Gerakan Non Blok negara-negara sedang berkembang diberi kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Memang harus diakui bahwa dalam tubuh Non Blok itu masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dimana harus diatasi, namun hal itu tidak mengurangi artinya sebagai wadah terutama dalam menghadapi dasawarsa mendatang.

Dalam kenyataannya, kekeliruan dalam memberikan interpretasi terhadap peranan Non Blok di masa perang dan di masa damai tidak usah sebenarnya terjadi hanya jika keputusan-keputusan KTT Non Blok I di Beograd sempat diteliti dengan seksama. Kekeliruan yang pernah terjadi itu sebagian besar adalah akibat kurangnya penerangan selama ini yang diberikan mengenai masalah-masalah yang ada kaitannya dengan perkembangan Non Blok sebagai wadah Dunia ketiga.

Memang benar bahwa KTT I itu memberikan tekanan pada masalah politik perang dingin, karena secara kebetulan masalah tersebut dinilai waktu itu oleh para peserta sebagai soal yang sangat mendesak dan perlu segera sebagai ambeg parama arta. tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa masalah ekonomi tidak dianggap KTT I sebagai masalah pokok.

Dalam rangka membicarakan relevan atau tidak relevannya Gerakan Non Blok, masih ada keraguan di kalangan banyak pihak yang menimbulkan pertanyaan: Apakah masih ada kegunaannya Non Blok yang diciptakan ketika dunia yang masih bipolar dalam dunia yang kini masih multipolar ? Mengenai perubahan dunia dari bipolar menjadi multipolar sebenarnya tidak membawa perubahan apa-apa terhadap peranan Non Blok. memang tidak dibantah kenyataan bahwa kini kekuatan dunia tidak hanya terpusat pada dua kutub saja seperti sebelumnya, tetapi telah

muncul pusat-pusat kekuatan lain seperti Eropa Barat, Eropa Timur, Jepang dan RRC. Namun pusat-pusat kekuatan baru itu belum mengubah strategic superiority yang masih dimiliki negara adikuasa dan jika dilihat dari segi ini, maka dalam kenyataannya dunia masih bipolar, karena semua pusat-pusat tersebut tanpa pengecualian masih memerlukan naungan payung nuklir negara adikuasa.

Meskipun nanti jika dunia secara nyata bergerak dari posisi bipolar ke posisi multipolar seperti yang diperkirakan, namun kedudukan Gerakan Non Blok tidak akan mengalami perubahan. Justru dengan bertambahnya jumlah pusat-pusat kekuatan di dunia, Non Blok akan dapat lebih banyak berperan karena dengan demikian akan lebih banyak terbuka kesempatan bagi Non Blok untuk lebih memperkuat daya tawar-menawarnya. Oleh karena itu, dalam menilai kembali kerelavansian Gerakan Non Blok tersebut, semua faktor yang berkaitan harus dipertimbangkan. dengan kata lain tidak ada perbedaan antara prioritas-prioritas baru dan prinsip-prinsip dasar serta tujuan-tujuan GNB. Gap yang melebar antara Utara dan Selatan, berlanjutnya krisis-krisis regional, ancaman terhadap kedaulatan negara-negara, berkembangnya ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi, krisis utang, meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan antara Utara dan Selatan dan konflik ras dan apartheid.

4.3 Mekanisme Gerakan Non Blok Sebagai Forum Penyelesaian Konflik Internasional.

Sejak bertahun-tahun Gerakan Non Blok merasa puas dengan mengambil keputusan secara mufakat (consensus). Pengambilan suara seperti ini terhadap salah satu keputusan ternyata pada hakikatnya lebih lemah dibandingkan keputusan atau resolusi PBB yang diambil dengan suara terbanyak dalam masalah yang sama. Kebijakan untuk mempertahankan cara seperti ini memang dipersoalkan, terutama mengingat bahwa keputusan atas dasar mufakat selama ini belum pernah membawa kepada penyelesaian suatu soal apapun.

Melalui keputusan dengan mufakat, GNB tidak dapat menyingkirkan dirinya dari persengketaan dikalangan anggotanya sendiri. Tetapi sikap menutup mata terhadap sengketa antara anggotanya dalam kenyataan itu sangat merugikan kredibilitas gerakan itu. Pada hakikatnya GNB dapat merupakan suatu kekuatan yang berguna, jika ia mampu menyelesaikan persengketaan internnya tanpa campur tangan negara asing, karena dengan demikian GNB akan mampu pula untuk memainkan peranan penengah pada forum yang lebih luas dalam hubungan persengketaan antara kelompok lain.

Memang tugas seperti ini menuntut kesetiakawanan yang tinggi dan disiplin yang tangguh, hal yang langka dalam GNB. Gerakan ini bahkan sering menjadi lumpuh

akibat permusuhan yang timbul dikalangan anggotanya, misalnya sengketa Somalia-Ethiopia, Iran-Irak dan Chad-Libya. Oleh karena itu ada kecenderungan umum dikalangan negara-negara Non Blok untuk tidak menyelesaikan persengketaan mereka apakah melalui badan yang telah disediakan untuk maksud tersebut, ataukah lewat jasa-jasa baik diplomasi atau cara lain.

Dalam hal seperti ini yang biasanya dilakukan adalah hanya menyarankan beberapa cara penyelesaian dan kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil tindakan selanjutnya tanpa adanya sanksi. Hal ini tidak banyak artinya, karena pihak-pihak bersengketa tidak merasa dan hanya menuruti keinginan mereka masing-masing serta melakukan apa yang mereka anggap baik untuk kepentingannya.

Perubahan-perubahan global yang berkembang yang mengikuti KTT di Beograd 1989, telah menghadapi langsung GNB pada sebuah ujian yang menantang. Saat itu merupakan waktu yang tepat bagi Gerakan tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Sifat dan langkah yang cepat dari perkembangan yang muncul dalam kancah internasional selama tiga tahun terakhir menunjukkan suatu kenyataan bahwa gerakan tersebut perlu membuat keputusan yang lebih mendesak, realistis dan praktis dibanding menghadapi tantangan dunia baru.

GNB pada hakekatnya dapat dipandang sebagai suatu instrumen diplomasi yang vital. Kekuatan GNB pada dasarnya sangat ditentukan oleh kekuatan nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota yang mampu dipersatukan dengan satu tekad untuk menyuarkan segala ketidakadilan yang dirasakannya.

Masalah perlombaan senjata merupakan hal yang secara fisik juga diluar kemampuan GNB untuk mencegahnya. Namun itu tetap mendapat perhatian yang sungguh dari kalangan negara Non Blok. GNB berpendirian bahwa karena hal ini menyangkut keselamatan dunia dan umat manusia, maka pembicaraan mengenai masalah itu dilakukan dibawah naungan PBB. Berdasarkan pemikiran tersebut, masalah perlombaan senjata dijadikan bahan pokok pertimbangan dan tetap dicantumkan dalam agenda setiap konferensi Non Blok, disamping usaha untuk menyalurkannya ke PBB.

Oleh karena itu GNB menyerahkan segala dan upaya serta tenaga untuk menarik perhatian dunia terhadap masalah perlucutan senjata itu, dan kemungkinan bencana yang bakal ditimbulkannya di satu pihak apabila tidak dicari jalan keluar untuk mengakhiri atau paling tidak untuk mengekangnya dan di pihak lain terhadap keuntungan yang mungkin dapat diraih oleh negara berkembang jika sebagian kecil pembiayaan itu dapat disalurkan untuk kepentingan pembangunan.

BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dimasa lalu orang sering mengacaukan pengertian Non Blok dengan pengertian netralitas atau netralisasi. Dalam satu hal memang terdapat persamaan antara pengertian istilah-istilah tersebut. Persamaan itu ialah dalam orientasi politik luar negeri, suatu negara tidak akan mengikat kemampuan militer dan diplomasinya pada tujuan negara lain. Dalam pengertian strategi politik luar negeri, keengganan untuk mengikatkan diri secara militer kepada negara lain disebut tanda tidak memihak. Tetapi sikap tidak memihak itu ditentukan oleh pelbagai macam keadaan.

Non Blok mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian tersebut. GNB bukanlah blok netral, dapat dilihat pernyataan pemimpin terkemuka Non Blok dalam Komunike bersama Nehru Tito di New Delhi tanggal 22 Desember 1954 jauh sebelum diadakan KTT Non Blok I di Beograd, yang menegaskan bahwa, (M. Sabir :1990, hal 20).

"Politik Non Blok yang telah dianut oleh pemerintah mereka masing-masing dan yang sedang dijalankan mereka bukanlah politik netral, netralisme ataupun politik pasif sebagaimana kadang-kadang diartikan orang, tetapi adalah politik aktif, positif, dan konstruktif yang berusaha untuk menciptakan satu perdamaian bersama sebagai satu-satunya dasar bagi keamanan bersama".

Politik Non Blok jelas tidak netral dan dengan demikian tidak pasif dan negatif, bahkan aktif dan juga positif. Gerakan ini memang tidak mempunyai kekuatan ekonomi apalagi kekuatan militer. Gerakan Non Blok dasarnya lebih banyak merupakan kekuatan moral. Untuk mengetahui dengan jelas Gerakan Non Blok dapat dikategorikan sebagai Organisasi Internasional yang mempunyai Kepribadian Internasional, serta perannya diforum internasional selama ini maka, Penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang dapat disebut sebagai Organisasi Internasional bilamana merupakan suatu persekutuan antara negara-negara yang secara permanen, dengan tujuan yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum, dilengkapi dengan organ-organ, pembedaan dalam kekuasaan hukum serta adanya suatu kekuasaan hukum yang dapat dilaksanakan oleh organisasi internasional itu, tidak saja dalam hubungan dengan sistem hukum nasional dari satu atau lebih negara tetapi juga level internasional.

Dengan melihat eksistensi GNB sekarang ini yang tidak pernah merumuskan suatu deklarasi yang berfungsi semacam konstitusi, maka GNB tidak dapat dikatakan sebagai organisasi internasional. Oleh karena itu pula sehingga GNB tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum internasional, sebab tidak memiliki legal personality untuk melakukan tindakan atau aktivitas.

2. Peranan GNB akan lebih terjamin jika dilihat bagaimana di dalam forum PBB sifatnya saling mengisi. Hubungan GNB dengan PBB, dimana setiap mengadakan sidang bulan September menjelang akan bersidangnya MU-PBB. Tujuannya agar semua keputusan KTT Non Blok itu nanti disalurkan ke mimbar dunia untuk diperjuangkan menjadi resolusi-resolusi MU-PBB.

5.2 Saran.

Sejak KTT I di Beograd tahun 1961 hingga KTT ke-XI di Colombia tahun 1995 jumlah anggota gerakan ini terus meningkat, tetapi peningkatan jumlah anggota itu tidak berarti bahwa dalam tubuhnya ada peningkatan konsolidasi sesuai dengan deklarasi-deklarasi yang telah di sepakati bersama dalam setiap KTT. Yang terjadi sebaliknya adalah pertentangan terus menerus akibat kekaburan kualifikasi keanggotaannya maupun akibat dari langkah beberapa anggotanya yang dinilai membawa gerakan ini kearah yang menyimpang dari tujuan semula.

Usaha yang membawa GNB berkiblat pada blok tertentu dan karena itu dinilai sebagai menyimpang dari prinsip Non Blok, telah pula mengakibatkan pertentangan yang semakin tajam di antara anggotanya. Sebagai contoh, dalam pertemuan biro koordinasi GNB bulan Mei tahun 1978 di Kuba, Menlu Kuba (waktu itu) Isidoro Malmierca Peoli, menyerukan negara-negara GNB untuk menyatukan diri dengan negara-negara sosialis dalam perjuangan bersama

untuk tegakkan Sosialisme di dunia.

Seruan Kuba itu telah mengundang reaksi keras dari sebagian negara anggota GNB, terutama Indonesia dan Yugoslavia. Melihat semua kenyataan itu kita jadi bertanya sampai kapan Wadah GNB itu bisa mengkonsolidasikan berbagai kepentingan dan bertentangan dalam tubuhnya?

Untuk itu penulis memberikan saran sehubungan dengan tujuan serta prinsip-prinsip dari GNB agar supaya gerakan ini tidak dikatakan mandul.

1. Sebaiknya GNB hendaknya mengkaji usaha-usahanya untuk meningkatkan keefektifitas serta kemampuannya dalam mengambil keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan sebaiknya mempunyai sekretariat yang tetap.
2. GNB harus pandai-pandai menggunakan instrument diplomasi untuk mengejar tujuannya.
3. Karena perang dingin saat ini sudah usai maka targetnya yang akan datang diprioritaskan adalah masalah ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Widjaja, Indonesia Asia-Afrika, Non Blok, Politik Bebas Aktif, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- DW Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- James Barros, PBB Dulu, Kini dan Esok, Rader Jaya Offset, Jakarta, 1990.
- J. Pareira Mandalangi, Segi-segi Hukum Organisasi Internasional, Binacipta, Bandung, 1986.
- Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (LKBN), Pesan Pembaharuan dari Bandung 30 tahun Konferensi Asia-Afrika, PT. Delapratasa, Jakarta, 1985.
- Miriam Budiarmo dan Maswadi Rauf, Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia Dimensi Pendidikan dan Pengajaran, Lipi, Jakarta, 1984.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1982.
- M. Sabir, Quo Vadis Non Blok?, CV. Haji Masagung, Jakarta 1990.
- Sumarno AP, Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Syahrudin, A. H., Pengantar Hukum Organisasi dan Internasional
Armigo, Bandung, 1987.

Wenny Makmoen, Semangat konferensi Bandung dalam perwujudan
Indonesia, Unsri, Palembang, 1985

Sumber-sumber lain :

- Makalah Univ. Pajajaran dan Departemen Dalam Negeri RI.
- majalah Tempo,
- majalah Kompas



